

# SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO



Oleh :

NENENG MUSYRIFATUL AMELIA  
NBI : 1222000065

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

## SKRIPSI

### ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO



Disusun Oleh :  
Neneng Musyrifatul Amelia  
NBI : 1222000065

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

### **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

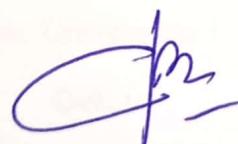
Nama Lengkap : Neneng Musyrifatul Amelia  
NBI : 1222000065  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi :

**ANALISIS AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DI KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO**

Surabaya, 20 Desember 2023

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing,



Muhammad Taufiq Hidayat, SE., MM

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Dipertahankan didepan sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tanggal 5 Januari 2024

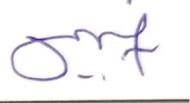
### **TIM PENGUJI :**

1. Dr. Hwihanus, SE.,MM.,CMA

– Ketua



2. Dr. Maria Yovita R. Pandin. MM.,CMA.,CPA.,CIAP - Anggota



3. Muhammad Taufiq Hidayat, SE., MM

- Anggota



Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA.

NPP. 20220.93.0319

## **SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIAT**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap (KTP) | : | Neneng Musyrifatul Amelia  |
| 2. NBI                | : | 1222000065   |
| 3. Fakultas           | : | Ekonomi dan Bisnis   |
| 4. Program Studi      | : | Akuntansi  |
| 5. NIK (KTP)          | : | 3515176704020001   |
| 6. Alamat Rumah (KTP) | : | Dsn. Tani Sawah RT 14 RW 07, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo |

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul :

### **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO”**

Adalah benar-benar hasil rancangan, tulisan, dan pemikiran saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiat atau menyalin atau menyadur karya tulis ilmiah orang lain baik berupa Artikel, Skripsi, Tesis maupun Disertasi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa Skripsi yang saya tulis adalah hasil Plagiat maka saya bersedia menerima sangsi apapun atas perbuatan saya dan bertanggung jawab secara mandiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Dosen Pembimbing dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 2024

Yang Membuat,



(Neneng Musyrifatul Amelia)



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45  
SURABAYATLP. 031 593  
1800 (EX 311)  
EMAIL: PERPUS@UNTAG-  
SBY.AC.ID.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Musyrifatul Amelia  
NBI : 1222000065  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**"ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO"**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.  
Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Neneng Musyrifatul Amelia)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Program Sarjana Akuntansi dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebanggaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya saya tujuakan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan dan segalanya. Terima kasih atas rahmat, ridho, dan barokah yang Engkau berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
2. Muhammad Taufiq Hidayat, S.E., M.M. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. H. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas kesempatan dan fasilitas serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh proses perkuliahan pada pendidikan Program Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dra. Cholis Hidayati, MBA., Ak., CA., CPAI. selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melaksanakan penelitian.
6. Bapak Dr. Hwihanus, SE.,MM.,CMA selaku ketua penguji skripsi, Ibu Dr. Maria Yovita R. Pandin. MM.,CMA.,CPA.,CIAP dan Bapak Muhammad Taufiq Hidayat, SE.,MM selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi serta untuk menguji Skripsi penulis.

7. Bapak M Zaini dan Ibu Sumarlik selaku kedua orang tua peneliti, serta adik tercinta Moh Nadif Syahrul Haj, yang selalu memberikan nasihat, kasih sayang, dukungan, serta doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Sahabat sekaligus saudara Dhifa Akhlaqul Karimah, Christana Imanuela Efenda Hutahaean, Yuni Nusa Arum, Imtyaaz Nahdiyant Ekaputri sahabat suka duka, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
  9. Ayonda Hayyuani selaku teman serta sahabat seperjuangan, terima kasih telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
  10. Sahabat penulis mulai dari semester pertama, Mitha Anggraini, Bella Dwi Ari Puspita K, Desy Tri Santy Rahmadani terima kasih atas kenangan indah selama ini.
  11. Seluruh Aparatur Desa Pepe, Desa Kwangasan, Desa Buncitan, Desa Cemandi, dan Desa Betro yang sudah meluangkan waktunya untuk peneliti dapat mengumpulkan data penelitian
  12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai
- Dengan segala kelebihan serta kekurangan yang ada, saya menyadari bahwa masih banyak cacat dalam skripsi ini dan saya terbuka menerima saran dan kritik untuk perbaikan. Motto saya adalah “Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan milik mereka yang senantiasa berusaha (B.J. Habibie)”
- Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan para pembaca. Terima Kasih.

Surabaya, 20 Desember 2023

Penulis

## **RINGKASAN**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintah NKRI.

Dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan Desa ada azas dalam pengelolaan, ialah azas transparansi, azas akuntabel, azas partisipasi, serta azas tertib serta disiplin anggaran. Sebaliknya buat penafsiran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai obyek didasarkan pada permasalahan atau fenomena yang ada yaitu keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dan adanya masalah dalam kelengkapan dokumen pengadaan bukti pertanggungjawbannya. Pada kecamatan ini mempunyai jumlah desa sebanyak 16 Desa dan fokus penelitian disini mengambil lima desa sebagai obyek penelitian oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada penelitian. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil observasi dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah catatan, memo, papan informasi, dan dokumentasi kegiatan. Penulis menganalisis data dengan cara transkrip data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini memeproleh hasil bahwa: 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di lima desa telah menerapkan sistem prinsip akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adanya forum masyarakat yaitu Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Selain itu dalam musrenbangdes ini Pemerintah Desa secara terbuka menerima usulan/masukan masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut menjalankan pembangunna desa, 2) Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lima desa yang ada dikecamatan sedate telah melakukan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi mengenai kegiatan yang akan dijalankan dan sudah terlaksananya pertanggungjawaban kegiatan secara fisik dan administrasi yang sudah sesuai dan lengkap. Karena kelengkapan tersebut akan berguna sebagai salah satu syarat dari proses pencairan dana periode berikutnya dengan pertanggungjawaban administrasi yang sudah selesai untuk periode sebelumnya di masing-masing desa, 3) Tahap penetausahaan Alokasi Dana Desa di kelima desa

telah melakukan prinsip akuntabilitasnya dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana yang telah diterima melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), 4) Tahap pelaporan Alokasi Dana Desa di lima desa tersebut telah melakukan prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaporan keuangan yang dibuat oleh bendahara dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang nantinya akan dikontrol perkembangannya oleh pemerintah pusat melalui aplikasi tersebut, dan 5) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi pada tahun ini sudah baik dalam penerapan dalam prinsip akuntabilitas. Terihat dengan adanya kelengkapan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang didalamnya terdapat pelaksanaan kegiatan dengan bukti pendukung yaitu seperti kwitansi, nota pembelian yang telah dibuat oleh Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan.

## **SUMMARY**

*According to Law Number 6 of 2014, a village is a legal community unit that has regional boundaries that has the authority to control and manage government affairs. The interests of local residents are based on community initiatives, origins and traditional rights that are recognized and respected in the Republic of Indonesia government system.*

*In the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village finances there are principles in management, namely the principle of transparency, the principle of accountability, the principle of participation, and the principle of order and budget discipline. On the other hand, the interpretation of Village Fund Allocation (ADD) is the balancing fund received by the Regency/City in the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget after deducting the Special Allocation Fund.*

*This research, the author used Sedati District, Sidoarjo Regency as an object based on existing problems or phenomena, namely delays in reporting accountability and problems in the completeness of documents procuring evidence of accountability. This sub-district has a total of 16 villages and the research focus here takes five villages as research objects by the author.*

*This research uses qualitative data with a descriptive approach to research. The author uses primary data and secondary data. The primary data that the author uses are the results of observations and interviews, while the secondary data that the author uses are notes, memos, information boards and activity documentation. The author analyzes the data by means of data transcription, triangulation, and drawing conclusions.*

*This research obtained results that: 1) The Village Fund Allocation planning stage in five villages has implemented a system of accountability, participatory and transparency principles. This is proven by the existence of a community forum, namely Musrenbangdes (Village Development Planning Conference). Apart from that, in this musrenbangdes, the Village Government openly accepts suggestions/input from the community who were present at the deliberation to carry out village development, 2) The implementation stage of Village Fund Allocation in the five villages in the sub-district has implemented the principle of accountability, proven by the delivery of information regarding activities carried out will be carried out and accountability for physical and administrative activities will be carried out in an appropriate and complete manner. Because this completeness will be useful as one of the conditions for the process of disbursing funds for the next period with administrative accountability that has been completed for the previous period in each village, 3) The Village*

*Fund Allocation administration stage in the five villages has implemented the principle of accountability by recording all receipts and expenditures funds that have been received through the SISKEUDES (Village Financial System) application, 4) The Village Fund Allocation reporting stage in the five villages has carried out the principle of accountability well. This is proven by the financial reporting made by the treasurer using the SISKEUDES application, the development of which will later be controlled by the central government through this application, and 5) The accountability stage for Village Fund Allocation both technically and administratively this year is already well implemented in the principle of accountability . It can be seen that there is completeness in making the SPJ (Letter of Accountability) which includes the implementation of activities with supporting evidence, such as receipts, purchase notes that have been made by the Treasurer of the Activity Implementation Team.*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kelima Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menganalisis data dengan cara transkrip data, triangulasi sumber, dan reduksi data. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengolahan data dengan menggunakan cara transkrip data, triangulasi sumber, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisi data untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahapan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan penjelasan bahwa pada tahap perencanaan telah melakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan adanya forum masyarakat yaitu Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), tahap pelaksanaan alokasi dana desa telah melakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan bukti penyampaian informasi mengenai kegiatan yang akan dijalankan, tahap penatausahaan dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), tahap pelaporan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan adanya pelaporan yang telah dilakukan oleh bendahara desa dengan aplikasi SISKEUDES, dan tahap pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik dengan prinsip akuntabilitas dengan adanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun dalam hal ini masih diperlukan bimbingan dari pemerintah Kecamatan Sedati.

**Kata Kunci:** **Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa,  
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

## ***ABSTRACT***

### ***ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN SEDATI DISTRICT, SIDOARJO REGENCY***

*This research was conducted in connection with Accountability for Management of Village Fund Allocations in Sedati District, Sidoarjo Regency. The aim of this research is to determine and analyze the application of the principle of Accountability in managing Village Fund Allocations in the Five Villages in Sedati District, Sidoarjo Regency. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Researchers analyzed data by means of data transcription, source triangulation, and data reduction. The stages that researchers carried out started from observation, interviews, and documentation. The data processing process uses data transcription, source triangulation, data reduction, and drawing conclusions. Data analysis for managing Village Fund Allocations has five stages, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. The results of this research show that all stages are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 with the explanation that at the planning stage it has been carried out in accordance with the principle of accountability with the existence of a community forum, namely Musrenbangdes (Village Development Plan Deliberation), the implementation stage of village fund allocation has been carried out in accordance with the principle accountability with proof of providing information regarding activities to be carried out, the administration stage by recording all receipts and expenditures of funds using the SISKEUDES application (Village Financial System), the reporting stage is in accordance with the principle of accountability with reporting carried out by the village treasurer using the SISKEUDES application, and The accountability stage has been carried out well with the principle of accountability with the existence of a SPJ (Letter of Accountability) as a form of accountability, but in this case guidance is still needed from the Sedati District government.*

***Keyword:*** ***Accountability, Management of Village Fund Allocations, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018***

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN .....	ix
<i>SUMMARY</i> .....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Pertanyaan Penelitian .....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
1.4    Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1    Manfaat Praktis.....	3
1.4.2    Manfaat Teoritis .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	5
2.1    Landasan Teori.....	5
2.1.1    Akuntansi Sektor Publik .....	5
2.1.2    Desa.....	6
2.1.3    Pemerintah Desa.....	11

2.1.4	Akuntabilitas .....	11
2.1.5	Alokasi Dana Desa .....	14
2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....		27
3.1	Desain Penelitian.....	27
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.2.1	Tempat Penelitian .....	27
3.2.2	Waktu Penelitian .....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3.1	Jenis Data .....	28
3.3.2	Sumber Data .....	28
3.4	Informan Penelitian .....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6	Proses Pengolahan Data .....	29
3.7	Metode Analisis Data .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		35
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	35
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
4.2.1	Perencanaan Alokasi Dana Desa .....	41
4.2.2	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa .....	44
4.2.3	Penatausahaan Alokasi Dana Desa .....	46
4.2.4	Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	48
4.2.5	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa .....	49
4.3	Pembahasan Hasil Temuan Penelitian .....	52
4.3.1	Perencanaan .....	52
4.3.2	Pelaksanaan .....	58

4.3.3	Penatausahaan .....	64
4.3.4	Pelaporan .....	69
4.3.5	Pertanggungjawaban.....	75
4.4	Implikasi Penelitian .....	80
4.5	Keterbatasan Penelitian .....	80
BAB V	PENUTUPAN .....	83
5.1	Simpulan .....	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR	PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN	.....	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kriteria Tahap Perencanaan.....	31
Tabel 3.2 Kriteria Tahap Pelaksanaan .....	32
Tabel 3.3 Kriteria Tahap Penatausahaan .....	32
Tabel 3.4 Kriteria Tahap Pelaporan.....	33
Tabel 3.5 Kriteria Tahap Pertanggungjawaban .....	33
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sedati .....	36
Tabel 4.2 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepe dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	53
Tabel 4.3 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kwangsan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	54
Tabel 4.4 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cemandi dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .	55
Tabel 4.5 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buncitan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	56
Tabel 4.6 Perbandingan Proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betro dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	57
Tabel 4.7 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepe dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	59
Tabel 4.8 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kwangsan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	60

Tabel 4.9 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cemandi dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.61
Tabel 4.10 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buncitan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.62
Tabel 4.11 Perbandingan Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betro dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.....	.63
Tabel 4.12 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepe dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018....	.65
Tabel 4.13 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kwangsan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.65
Tabel 4.14 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cemandi dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.66
Tabel 4.15 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buncitan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.67
Tabel 4.16 Perbandingan Proses Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betro dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018...68	
Tabel 4.17 Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepe dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.69
Tabel 4.18 Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kwangsan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.70
Tabel 4.19 Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cemandi dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.71
Tabel 4.20 Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buncitan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	.72

Tabel 4.21 Perbandingan Proses Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betro dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.....	73
Tabel 4.22 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pepe dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	75
Tabel 4.23 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kwangsan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	76
Tabel 4.24 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cemandi dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	77
Tabel 4.25 Perbandingan Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buncitan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 .....	78
Tabel 4.26 Perbandingan Proses pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betro dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.....	79

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	25
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Sedati.....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi pada Pemerintahan Desa.....	38
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 2 Penelitian Terdahulu .....	91
Lampiran 3 Hasil Wawancara .....	110
Lampiran 4 Dokumentasi Pendukung .....	130
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi .....	139
Lampiran 6 Bukti Publikasi.....	140
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Kampus.....	141
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Sedati .....	142
Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian.....	143